

**Peralihan Kepemimpinan Indonesia: Pidato Pengunduran Diri Presiden Soeharto pada
21 Mei 1998**

Umar Abdul Aziz, Nur Hamidatul Alimiyah, Miftahur Rohman, Ahdila Umamiah,
Muhammad Riyan, M, Iqbal Maulana

Fategrand758@gmail.com

Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Abstrak

Artikel ini membahas pidato pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 yang menandai berakhirnya kepemimpinan otoriter yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade di Indonesia. Dengan menggunakan metode historis, artikel ini menggambarkan krisis ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an, yang menjadi puncak dari gerakan reformasi yang dipicu oleh tuntutan masyarakat akan perubahan. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Soeharto untuk mundur, termasuk tekanan ekonomi, sosial, dan politik, serta dampaknya terhadap transisi Indonesia menuju era reformasi. Pidato pengunduran diri Soeharto dipandang sebagai simbol perubahan besar dalam struktur pemerintahan, yang membuka jalan bagi pemulihan demokrasi dan pembaruan sistem politik di Indonesia. Artikel ini juga menyoroti dinamika sosial dan politik yang mendasari peristiwa tersebut, serta tantangan yang dihadapi Indonesia dalam proses transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis.

Kata kunci : ***sejarah, kepemimpinan Soeharto, peralihan kekuasaan, sistem politik Indonesia***

Abstract:

This article discusses President Soeharto's resignation speech on May 21, 1998, which marked the end of his more than three-decade-long authoritarian rule in Indonesia. Using a historical method, this article describes the economic and social crisis that struck Indonesia in the late 1990s, which became the peak of the reform movement driven by the public's demand for change. Furthermore, this article identifies the factors that influenced Soeharto's decision to

resign, including economic, social, and political pressures, as well as its impact on Indonesia's transition to the reform era. Soeharto's resignation speech is seen as a symbol of significant change in the governmental structure, paving the way for the restoration of democracy and the renewal of the political system in Indonesia. The article also highlights the social and political dynamics underlying the event, as well as the challenges Indonesia faced in the process of transitioning to a more democratic government.

Keywords: *history, Soeharto's leadership, preservation of power, Indonesian political system*

Pendahuluan

Maret 1968 MPRS secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia Masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia, yang berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berusaha memperbaiki kehidupan bangsa dan negara dengan mengikuti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama Soeharto adalah membangun kembali struktur kehidupan rakyat dan negara yang lebih baik, serta menjauhkan Indonesia dari pengaruh komunisme yang dianggap sebagai masalah besar pada masa itu.

Salah satu langkah yang diambil Orde Baru adalah mengubah arah kebijakan luar negeri Indonesia. Pada masa sebelumnya, Indonesia lebih dekat dengan negara-negara komunis, namun Orde Baru ingin mengubah citra ini. Pemerintahannya bekerja keras untuk kembali menjadi anggota PBB dan menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih netral dan aktif, jauh dari pengaruh negara-negara komunis.¹

selama lebih dari tiga puluh tahun, Orde Baru muncul sebagai upaya untuk memulihkan kondisi negara yang sebelumnya mengalami ketegangan politik dan keruntuhan ekonomi di bawah pemerintahan Soekarno. Dalam rangka mencapai stabilitas dan kemajuan ekonomi, Soeharto menerapkan berbagai kebijakan yang menekankan pada keamanan politik dan mempercayakan pembangunan ekonomi kepada para teknokrat. Pemerintahan ini juga

¹ Dwi Wahyono, Hadi gayung kusuma, PROPAGANDA ORDE BARU 1966-1980, Verleden, Vol. 1, No.1 Desember 2012: 1- 100

dikenal karena pengaturan politik yang didominasi oleh militer, yang dianggap sebagai kekuatan yang dapat menjaga kelangsungan negara setelah revolusi.

Meskipun Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang baik pada awalnya, pemerintahan ini tidak luput dari berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik. Ketergantungan yang tinggi pada bantuan luar negeri, terutama dari IMF, serta kegagalan dalam melakukan reformasi ekonomi yang berkelanjutan, membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap krisis. Krisis yang dimulai di Thailand pada tahun 1997 kemudian berdampak pada Indonesia, dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan lonjakan harga barang. Kegagalan pemerintah dalam menangani krisis ini, ditambah dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto semakin menurun.

Ketegangan semakin meningkat dengan munculnya gerakan mahasiswa dan demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Soeharto. Aksi-aksi ini mencapai puncaknya dengan tragedi Trisakti, yang mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap pemerintahan yang telah berkuasa selama 32 tahun. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto, yang sebelumnya dianggap sebagai sosok yang tak tergoyahkan, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Akhir dari pemerintahan Presiden Soeharto, yang ditandai dengan pembacaan surat pengunduran diri pada 21 Mei 1998, merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Soeharto adalah sosok yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun dengan kekuasaan yang sangat kuat. Keberlanjutan masa jabatannya yang panjang inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna memahami faktor-faktor yang menyebabkan Soeharto mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.²

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, penulis mengadopsi pendekatan historis sebagai metode penelitian. Mengacu pada pendapat Louis Gottschalk, metode sejarah merupakan serangkaian teknik yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara mendalam sumber-sumber atau dokumentasi yang berasal dari masa lalu. Proses rekonstruksi yang dihasilkan dari analisis data atau informasi ini dikenal sebagai historiografi (penulisan sejarah). Penelitian sejarah biasanya

²Lilik Eka Aprilia, Drs. Kayan Swastika, M.si, Drs. Sumarjono, M.Si, BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN PRESIDEN SOEHARTO TAHUN 1998, Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, hal 1-2

melalui beberapa langkah, yang mencakup: 1) Heuristik (pengumpulan sumber), 2) Kritik sumber, 3) Interpretasi atau penafsiran, dan 4) Historiografi atau penulisan.

Dalam penelitian ini, langkah awal yang diambil penulis adalah tahap Heuristik, yang melibatkan pengumpulan berbagai sumber informasi yang relevan. Dari proses ini, penulis berhasil mengumpulkan sumber utama berupa rekaman video di YouTube, yang mencakup pidato Soeharto tentang pengunduran dirinya sebagai presiden.

1. Sumber Primer

Penulis telah mengumpulkan berbagai pidato yang disampaikan oleh Soeharto mengenai pengunduran dirinya, di samping koleksi artikel surat kabar yang berkaitan dengan reformasi tahun 1998.

2. Sumber Sekunder

Penulis juga mengakses sejumlah buku dan artikel journal yang mendukung kajian ini, di antaranya:

- a. "Sistem Presidensial Masa Transisi (1998-2004)" oleh Diana Fawzia, Firman Noor, Ikrar Nusa Bhakti, Irine Hiraswari, Gayatri Nurliah Nurdin, Syamsuddin Haris, dan Wasisto Raharjo. "Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto" yang ditulis oleh Lilik Eka Aprilia, Des. Kayan Swastika, dan Drs. Sumarjono, M.Si, dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.
- b. "Propaganda Orde Baru 1966-1980" oleh Dwi Wahyono Hadi.
- c. "Peranan Soeharto dalam Membangun Perekonomian di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998)" oleh Ika Frelia, Anggar Kaswati, dan Sumardiono.
- d. "Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran". "Perkembangan Partai Politik pada Masa Orde Baru (1966-1998)" oleh Arief Hidayat. Dokumen dan literatur ini didapatkan dari berbagai perpustakaan dan sumber akademik yang kredibel.

Setelah tahap pengumpulan sumber dilakukan, langkah berikutnya adalah kritik sumber. Pada fase ini, penulis menganalisis setiap sumber yang telah dikumpulkan, bertujuan untuk mengevaluasi keaslian dan kredibilitas informasi yang diperoleh. Setelah proses kritik sumber

selesai, penulis melanjutkan dengan tahap interpretasi. Pada langkah ini, penulis berupaya menemukan hubungan antar fakta yang terungkap dalam sumber dan menafsirkannya. Akhirnya, tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah penulisan atau historiografi yang menyajikan temuan serta analisis yang telah disusun.

PEMBAHASAN

A. Faktor pendorong presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab runtuhnya kekuasaan orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto antara lain, krisis ekonomi, krisis politik, krisis keamanan, krisis sosial budaya

a. Krisis moneter di Indonesia tahun 1997

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 merupakan bagiandari krisis keuangan Asia yang diawali di Thailand. Krisis ini disebabkan oleh penurunan nilai tukar baht Thailand pada bulan Juli tahun 1997, setelah upayanya untuk mempertahankan nilainya terhadap dolar AS gagal. Peristiwa ini cepat menyebar ke Negara – Negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia. Di Indonesia, dampak krisis terhadap perekonomian diperburuk oleh ketergantungan oleh investasi asing jangka pendek dan lemahnya sistem keuangan di Asia Tenggara.³

Secara eksternal, Indonesia sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar diAsia,terutama karena ketergantungannya pada modal asing jangka pendek. Ketika para investor luar negeri melakukan penarikan dana secara besar - besaran, nilai tukar rupiah merosot dari lebih kurang Rp2.400 per dolar AS menjadi lebih dari Rp16.000 per dolar AS pada puncak krisis. Akibat dari penurunan tajam ini adalah lonjakan biaya impor dan utang luar negeri swasta, yang mayoritas dalam bentuk dolar. Di samping itu, penurunan harga komoditas ekspor seperti minyak, gas, dan hasil tambang juga turut memberikan tekanan pada pendapatan nasional.⁴

Dari sisi internal, salah satu penyebab utamanya adalah ketidakkuatan sistem perbankan nasional. Sejumlah bank swasta nasional memberikan pinjaman tanpa jaminan atau kepada perusahaan yang dimiliki oleh pemilik bank tersebut, yang dikenal dengan istilah crony capitalism. Praktik ini mengakibatkan meningkatnya kredit bermasalah (non-performing loans)

³ Katadata.co.id. (2024). Kilas Balik Krisis Moneter 1997: Salah Satu Periode Klam Indonesia.

⁴ Educhannel.id. (2023). Fenomena Krisis Moneter Tahun 1997 di Indonesia.

ketika ekonomi mulai tidak stabil. Pemerintah terpaksa menutup dan menyelamatkan puluhan bank dengan program rekapitalisasi yang memakan biaya sangat besar.⁵

Faktor internal lainnya adalah akumulasi utang luar negeri swasta yang tidak terkontrol. Karena nilai tukar rupiah sebelumnya stabil, banyak perusahaan di Indonesia meminjam dalam bentuk dolar AS tanpa hedging. Ketika nilai tukar jatuh, utang - utang ini meningkat berkali - kali lipat, menyebabkan banyak perusahaan bangkrut. Dengan bertambahnya faktor turunnya kepercayaan investor terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, situasi pun memburuk dengan cepat.

Krisis ini memiliki dampak yang sangat luas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang awalnya positif berbalik menjadi negatif, mencapai - 13,1% pada tahun 1998. Inflasi meningkat tajam, pengangguran bertambah, dan kemiskinan menjadi hal yang umum. Di ranah sosial - politik, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru mencapai puncaknya, yang memaksa Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998 setelah lebih dari tiga dekade berkuasa⁶

b. Situasi Kondisi Sosial Politik di Indonesia

1. Pemerintahan Otoriter

Selama Orde Baru, pemerintahan Soeharto dikenal sebagai rezim otoriter, dengan kekuasaan terpusat di tangan presiden dan ruang demokrasi yang sangat sempit. Salah satu ciri khas pemerintahan ini adalah adanya peran dominan militer dalam urusan sipil melalui konsep Dwifungsi ABRI, yang memungkinkan militer untuk tidak hanya mengurus pertahanan dan keamanan, tetapi juga berperan dalam pemerintahan dan birokrasi. Dalam struktur politik ini, militer menduduki berbagai posisi strategis, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun dalam aspek sosial masyarakat. Di samping itu, oposisi politik ditekan dengan berbagai cara, seperti membatasi aktivitas partai politik, membredel media, dan menangkap atau menghilangkan aktivis secara paksa. Akibatnya, meski di permukaan tampak stabil, sistem politik ini bersifat represif dan membatasi kebebasan rakyat. Selama Orde Baru, pemerintahan Soeharto dikenal sebagai rezim otoriter, dengan kekuasaan terpusat di tangan presiden dan ruang demokrasi yang sangat sempit. Salah satu ciri khas pemerintahan ini adalah adanya peran dominan militer

⁵ HMPK Elamas. (2023). Krisis Moneter Indonesia 1998: Penyebab dan Dampak.

⁶ Kuttab Digital. (2023). Faktor Penyebab Krisis Moneter 1997-1998.

dalam urusan sipil melalui konsep Dwifungsi ABRI, yang memungkinkan militer untuk tidak hanya mengurus pertahanan dan keamanan, tetapi juga berperan dalam pemerintahan dan birokrasi. Dalam struktur politik ini, militer menduduki berbagai posisi strategis, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun dalam aspek sosial masyarakat. Di samping itu, oposisi politik ditekan dengan berbagai cara, seperti membatasi aktivitas partai politik, membredel media, dan menangkap atau menghilangkan aktivis secara paksa. Akibatnya, meski di permukaan tampak stabil, sistem politik ini bersifat represif dan membatasi kebebasan rakyat.⁷

2. Ketidakpuasan terhadap Rezim

Seiring berjalannya waktu, ketidakpuasan publik, terutama dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil, mulai muncul terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dianggap merajalela. Selama Soeharto berkuasa, keluarga dan kerabatnya mengantongi keuntungan besar dari proyek-proyek strategis nasional, sementara rakyat kecil kian terpinggirkan, terutama saat krisis moneter melanda Indonesia pada 1997. KKN berfungsi sebagai lambang utama ketidakadilan dan mendorong munculnya tuntutan akan reformasi total.

Dalam kondisi yang semakin memanas, mahasiswa menjadi penggerak utama dari gerakan reformasi. Mereka mengatur aksi demonstrasi masif di sejumlah kota, yang puncaknya adalah pendudukan Gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Empat mahasiswa Universitas Trisakti yang tewas dalam aksi damai pada 12 Mei 1998 memicu kemarahan publik dan mempercepat runtuhnya legitimasi Soeharto. Selain menuntut pengunduran dirinya, mahasiswa juga menyerukan reformasi total dalam sistem politik, hukum, dan ekonomi di Indonesia.

Setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto akhirnya resmi mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, di tengah tekanan kuat dari masyarakat, mahasiswa, dan tokoh politik. Peristiwa ini menandai dimulainya era Reformasi di Indonesia.

3. Tuntutan Reformasi

Dalam gerakan reformasi 1998, mahasiswa mengusulkan lima tuntutan utama sebagai respons terhadap krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto. Yang pertama, mereka menuntut agar Soeharto mundur dari jabatannya, karena dianggap sebagai simbol kekuasaan yang penuh dengan korupsi, otoritarianisme, dan

⁷ Ricklefs, M.C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c.1200*. Palgrave Macmillan.

merupakan penyebab utama krisis politik dan ekonomi yang sedang berlangsung. Kedua, mahasiswa menuntut amandemen UUD 1945 demi perbaikan sistem ketatanegaraan agar lebih demokratis dan akuntabel, yang meliputi pembatasan masa jabatan presiden serta penguatan peran legislatif.

Tuntutan ketiga menginginkan dihapusnya Dwifungsi ABRI, yang merupakan peran ganda militer di sektor pertahanan dan pemerintahan sipil, dan yang menjadi alat utama dalam menopang kekuasaan otoriter selama Orde Baru. Mahasiswa ingin agar militer kembali ke barak dan tidak terlibat dalam politik. Keempat, mereka menuntut adanya pemilu yang demokratis dan jujur sebagai dasar bagi sistem politik yang sehat dan representatif, berbeda dari pemilu semu di era Orde Baru yang selalu dimenangkan oleh Golkar. Mahasiswa juga menegaskan pentingnya supremasi hukum dan penghapusan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), yang telah merusak sistem birokrasi dan ekonomi negara.

Kelima tuntutan ini dikenal sebagai agenda utama Reformasi 1998, dan menjadi landasan bagi berbagai perubahan politik yang terjadi di Indonesia setelah Soeharto lengser.⁸

c. Situasi Kondisi Keamanan di Indonesia

Ketika Presiden Soeharto hendak mengundurkan diri pada Mei 1998, keadaan keamanan di Indonesia sangat genting, tidak stabil, dan kacau. Aksi demonstrasi mahasiswa yang awalnya berlangsung dengan damai di berbagai universitas mulai meluas ke jalan-jalan umum, memicu kerusuhan dan kekerasan besar - besaran. Ketidamampuan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi yang disebabkan oleh krisis moneter Asia 1997 semakin memperburuk ketegangan sosial. Ketika mahasiswa dan rakyat turun ke jalan untuk menuntut reformasi, aparat keamanan sering kali merespons dengan tindakan kekerasan yang memperburuk keadaan.⁹

Puncak ketegangan terjadi pada 12 Mei 1998 saat Tragedi Trisakti, di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat tembakan aparat saat melakukan aksi damai. Peristiwa ini mengakibatkan kerusuhan besar di Jakarta pada 13 – 15 Mei 1998, yang kemudian menyebar ke kota - kota lain seperti Solo, Medan, dan Surabaya. Kerusuhan tersebut ditandai dengan penjarahan, pembakaran, kekerasan seksual, dan pembunuhan, terutama terhadap

⁸ Mietzner, Marcus. (2009). *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.

⁹ Aspinall, Edward. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford University Press.

masyarakat keturunan Tionghoa. Ratusan orang tewas, ribuan struktur roboh, dan keadaan makin tak terawasi.

Sebagai aparat keamanan utama, ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) berada dalam posisi yang dilematis. Mereka di satu sisi diperintahkan untuk meredam kerusuhan, tetapi di sisi lain muncul retakan internal antara faksi reformis dan faksi pro-Soeharto. Beberapa jenderal senior mulai menunjukkan ketidaksepahaman terhadap kebijakan Soeharto. Kondisi ini melemahkan kekuatan militer dan membuat pengamanan nasional semakin tidak efektif. Di samping itu, demonstran yang dihadapi dengan pendekatan represif justru akan memperkuat gelombang protes masyarakat dan membuat rezim kehilangan legitimasi di mata publik.¹⁰

Dalam situasi yang ditandai oleh tekanan sosial besar - besaran, deteriorasi keamanan, dan mulai menguapnya dukungan dari kalangan elit politik serta militer, Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998. Keadaan keamanan yang kacau dan meningkatnya potensi konflik horizontal menjadi salah satu faktor kunci yang mempercepat kejatuhannya. Peristiwa tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia, menandai berakhirnya rezim Orde Baru dan dimulainya era Reformasi.¹¹

d. Situasi Kondisi Sosial Budaya

Ketika Soeharto lengser pada tahun 1998, masyarakat Indonesia berada dalam kondisi sosial budaya yang sangat tegang, penuh tekanan, dan di ambang perubahan besar. Akibat krisis ekonomi yang melanda semua lapisan sosial, khususnya kelas menengah ke bawah, masyarakat Indonesia pada waktu itu hidup dalam ketidakpastian. Harga barang kebutuhan sehari - hari meroket, pengangguran bertambah, dan akses terhadap layanan publik menurun. Akibatnya, kesenjangan sosial yang semakin mencolok muncul, menimbulkan frustrasi, kemarahan, dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah.¹²

Dari aspek budaya, masyarakat telah mengalami tekanan selama bertahun-tahun akibat pengekangan kebebasan berekspresi oleh rezim Orde Baru. Pemerintah membungkam budaya kritik dan memberlakukan pembatasan ketat terhadap kebebasan pers dan seni. Ketika gerakan

¹⁰ Kingsbury, Damien. (2003). *Power Politics and the Indonesian Military*. Routledge.

¹¹ Lane, Max. (2008). *Unfinished Nation: Indonesia Before and After Suharto*. Verso.

¹² Aspinall, Edward. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford University Press.

reformasi mulai menggema, luapan ekspresi dari berbagai kelompok masyarakat — seperti seniman, intelektual, budayawan, dan mahasiswa — yang sebelumnya terbungkam pun muncul sebagai akibatnya. Mereka memanfaatkan momentum krisis ini untuk mengungkapkan aspirasi dan identitas budaya yang telah lama terabaikan.¹³

Di samping itu, situasi sosial juga dipengaruhi oleh ketegangan antara kelompok etnis dan agama, terutama saat terjadinya kerusuhan pada Mei 1998. Etnis Tionghoa menjadi target dari berbagai bentuk kekerasan, seperti penjarahan, penganiayaan, dan kekerasan seksual. Ini menunjukkan betapa rapuhnya hubungan sosial antar kelompok akibat kebijakan diskriminatif yang dibiarkan atau bahkan dipelihara selama Orde Baru. Momen ini mencerminkan kegagalan rezim dalam menciptakan harmoni sosial dan multikulturalisme yang inklusif.

Dengan lengsernya Soeharto, terjadilah kebangkitan budaya kritik, reformasi nilai-nilai sosial, dan pemulihan hak-hak budaya serta identitas kelompok-kelompok yang selama ini ditekan. Ini menandai dimulainya transformasi sosial budaya di Indonesia ke arah masyarakat yang lebih terbuka, plural, dan demokratis.¹⁴

B. Proses peralihan kepemimpinan dari Soeharto kepada BJ Habibie setelah pidato pengunduran diri 21 Mei 1998

Proses peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie berlangsung dalam kerangka konstitusional yang tercantum dalam UUD 1945, khususnya Pasal 8 yang menyebut bahwa apabila presiden berhalangan, maka wakil presiden akan menggantikannya. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyampaikan secara resmi pidato pengunduran diri di Istana Merdeka, yang kemudian diikuti dengan pelantikan Habibie oleh Mahkamah Agung dalam upacara yang sederhana namun bersejarah.

Peristiwa ini tidak terjadi secara mendadak. Pada malam sebelumnya, Soeharto telah memanggil Habibie ke kediamannya di Jalan Cendana dan menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri. Dalam pertemuan tersebut, Soeharto menyatakan bahwa ia akan menyerahkan mandat kepada Habibie sebagai Wakil Presiden sesuai amanat konstitusi.

¹³ Heryanto, Ariel. (2006). *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging*. Routledge.

¹⁴ Suryadinata, Leo. (2003). *Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.

Habibie menyambut keputusan itu dengan penuh kehati-hatian dan meminta jaminan bahwa proses yang dijalankan benar-benar sah secara hukum dan sesuai prosedur negara.¹⁵

Pengalihan kekuasaan ini memunculkan perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak, terutama mahasiswa dan kelompok pro-reformasi, menganggap bahwa naiknya Habibie ke kursi presiden hanyalah perpanjangan dari rezim Orde Baru. Mereka menilai bahwa pergantian sosok pemimpin belum mencerminkan perubahan sistemik yang diinginkan. Aksi-aksi unjuk rasa pun tetap berlangsung meskipun Soeharto telah mundur, karena dianggap bahwa reformasi belum benar-benar dimulai.¹⁶

Sementara itu, di sisi lain, pengunduran diri Soeharto dan pelantikan Habibie dinilai sebagai langkah elegan dan damai untuk mencegah konflik yang lebih besar. Transisi kepemimpinan dilakukan tanpa kekerasan, kudeta, ataupun tindakan represif militer, menjadikan Indonesia sebagai contoh negara yang mampu melakukan perubahan secara damai meski dalam situasi tekanan krisis.¹⁷

Habibie pun menyadari beban besar yang harus dipikulnya sebagai presiden baru dalam masa transisi. Ia memahami bahwa posisinya tidak sepenuhnya diterima oleh publik, namun ia memilih untuk langsung bergerak cepat melakukan langkah-langkah reformasi, termasuk membentuk kabinet baru dan menyiapkan pemilu yang lebih demokratis. Dalam pandangannya, transisi kekuasaan ini bukan semata-mata soal jabatan, tetapi amanah untuk menyelamatkan negara dari keruntuhan total.¹⁸

Proses peralihan kekuasaan dari Soeharto kepada Habibie merupakan momen krusial dalam sejarah politik Indonesia. Meski dilakukan secara formal sesuai konstitusi, namun tidak serta-merta diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketegangan antara kebutuhan akan stabilitas dan tuntutan perubahan menjadi penanda khas masa transisi tersebut.

C. Dampak dari pengunduran diri Soeharto terhadap stabilitas politik Indonesia

¹⁵ Habibie, B. J. (2018). Detik-detik yang menentukan: Jalan panjang Indonesia menuju demokrasi. The Habibie Center.

¹⁶ Suparno, B. A. (2012). *Reformasi dan jatuhnya Soeharto*. Victory Jaya Abadi.

¹⁷ Sianipar, F. F., Siregar, H. S., Fadhillah, I. M. R., & Sigalingging, M. M. (2022). Soeharto bukan dilengserkan melainkan mundur. *Jurnal Humanitas*, 9(1), 28-42. <https://doi.org/10.29408/jhm.v9i1.6571>

¹⁸ Habibie, B. J. (2018). Detik-detik yang menentukan: Jalan panjang Indonesia menuju demokrasi. The Habibie Center.

Pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 merupakan titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia. Setelah 32 tahun memerintah di bawah rezim Orde Baru, kejatuhan Soeharto dipicu oleh krisis moneter Asia 1997–1998, gelombang demonstrasi mahasiswa, serta tekanan dari elite politik dan militer. Situasi ekonomi yang memburuk drastis, ditambah dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menciptakan ketidakpuasan luas di tengah masyarakat.¹⁹

Pasca pengunduran dirinya, Indonesia memasuki era Reformasi yang ditandai dengan transisi politik yang penuh gejolak. Presiden B.J. Habibie, sebagai penerus Soeharto, menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan pemerintahan sembari membuka ruang demokrasi. Munculnya banyak partai politik baru, desentralisasi kekuasaan, serta tuntutan reformasi hukum dan militer, dan menciptakan dinamika baru yang belum pernah terjadi di era sebelumnya.²⁰

Di sisi lain, terbukanya ruang kebebasan sipil seperti kebebasan pers, berkumpul, dan berpendapat membawa angin segar dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Namun, kebebasan yang tiba-tiba ini juga memunculkan sejumlah konflik horizontal, terutama yang berkaitan dengan isu-isu etnis dan agama. Ketegangan di beberapa daerah seperti Ambon dan Poso menjadi bukti bagaimana transisi demokrasi juga membawa risiko ketidakstabilan sosial.²¹

Meski awalnya penuh tantangan, pengunduran diri Soeharto membuka jalan bagi pembentukan sistem politik yang lebih demokratis. Dalam jangka panjang, Indonesia berhasil mengadakan pemilu langsung, membangun institusi yang lebih transparan, serta memperkuat peran masyarakat sipil. Kejatuhan Soeharto, meskipun mengguncang stabilitas politik dalam jangka pendek, menjadi fondasi penting dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.²²

¹⁹ Anwar, Dewi Fortuna. "Indonesia di Tengah Arus Besar Dunia: Pergulatan dalam Politik Luar Negeri Era Orde Baru". LIPI Press, 2009.

²⁰ Damanik, Ali. "Proses Reformasi dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 6, No. 2, 2002.

²¹ Hidayat, Syarif. "Pergeseran Politik Lokal di Indonesia Pasca Orde Baru". Pusat Penelitian Politik LIPI, 2007.

²² Mujani, Saiful. "Demokrasi dan Kinerja Pemerintahan di Indonesia Pasca Orde Baru." *Jurnal Prisma*, No. 3, 2009.

Reformasi politik yang terjadi setelah kejatuhan Soeharto juga memunculkan aktor-aktor politik baru yang sebelumnya tidak memiliki ruang dalam struktur kekuasaan Orde Baru. Keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan LSM dalam proses pengambilan kebijakan menjadi semakin menonjol. Perubahan ini mengindikasikan pergeseran dari sistem sentralistik menuju tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan inklusif. Namun demikian, masa transisi ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Politik uang, lemahnya institusi penegakan hukum, dan masih kuatnya pengaruh elit lama menghambat proses demokratisasi yang ideal. Stabilitas politik dalam era Reformasi bersifat dinamis dan fluktuatif, tergantung pada konteks sosial dan kepemimpinan yang tengah berlangsung.

Selain itu, dampak pengunduran diri Soeharto terhadap stabilitas politik juga tercermin dalam dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan otonomi daerah yang dipercepat seringkali belum diikuti oleh kesiapan kapasitas birokrasi lokal, sehingga menimbulkan ketimpangan kebijakan dan potensi konflik lokal di sejumlah wilayah. Secara keseluruhan, pengunduran diri Soeharto telah menjadi pintu gerbang menuju reformasi politik besar-besaran di Indonesia. Meski tidak sepenuhnya mulus, proses ini telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan membuka peluang bagi konsolidasi demokrasi di masa depan.

Kesimpulan

pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 disebabkan oleh beberapa faktor, seperti krisis ekonomi, ketidakpuasan sosial, dan ketegangan politik. Krisis ekonomi yang dimulai dari krisis moneter menyebabkan banyak kesulitan bagi rakyat Indonesia, sementara korupsi dan ketidakadilan dalam pemerintahan membuat banyak orang tidak puas dengan kepemimpinan Soeharto. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat, ditambah dengan kerusuhan dan tragedi Trisakti, semakin memperburuk situasi dan membuat Soeharto akhirnya mengundurkan diri.

Pasca mundurnya presiden Soeharto, Indonesia memasuki era Reformasi, yang ditandai dengan perubahan besar menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Meskipun ada banyak tantangan, seperti ketegangan sosial dan ketidakstabilan awal, pengunduran diri Soeharto membuka jalan bagi kebebasan yang lebih besar, lebih banyak hak rakyat, dan perubahan positif dalam politik Indonesia. Reformasi ini memungkinkan rakyat lebih terlibat dalam kehidupan politik dan mendorong perbaikan di berbagai sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, L. E., & Swastika, K. (2014). Berakhirnya pemerintahan presiden Soeharto tahun 1998.
- Aspinall, E. (2005). *Menentang Suharto: Kompromi, perlawanan, dan pergantian rezim di Indonesia*. Stanford University Press.
- Farhan, M. *Romantisisme Reformasi 1998 dalam Puisi Cinta yang Marah Karya M. Aan Mansyur dan Relevansinya terhadap Pembelajaran Sastra di SMA* (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hadi, D. W., & Kasuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Media Verleden*, 1(1), 1-109.
- Habibie, B. J. (2018). Detik-detik yang menentukan: Jalan panjang Indonesia menuju demokrasi. The Habibie Center.
- Ihza Mahendra, Y. (2008, Januari 17). *Naskah pernyataan berhenti Presiden Soeharto, 21 Mei 1998*. YusrilIhzaMahendra.com. Diakses 6 April 2025, dari <https://yusril.ihzamahendra.com/2008/01/17/naskah-pernyataan-berhenti-presiden-soeharto-21-mei-1988/>
- Kompaspedia. (n.d.). *Kronologi pengunduran diri Presiden Soeharto*. Kompaspedia. Diakses 6 April 2025, dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kronologi-pengunduran-diri-presiden-soeharto>
- Lane, M. (2008). *Bangsa yang belum selesai: Indonesia sebelum dan sesudah Suharto*. Verso Books.
- Mietzner, M. (2009). *Politik militer, Islam, dan negara di Indonesia: dari transisi yang bergejolak menuju konsolidasi demokrasi*. Institut Studi Asia Tenggara.
- Mujani, Saiful. "Demokrasi dan Kinerja Pemerintahan di Indonesia Pasca Orde Baru." *Jurnal Prisma*, No. 3, 2009.
- Ricklefs, M. C. (1981). *A history of modern Indonesia*.

Sianipar, F. F., Siregar, H. S., Fadhillah, I. M. R., & Sigalingging, M. M. (2022). Soeharto bukan dilengserkan melainkan mundur. *Jurnal Humanitas*, 9(1), 28-42.
<https://doi.org/10.29408/jhm.v9i1.6571>

Suparno, B. A. (2012). *Reformasi dan jatuhnya Soeharto*. Victory Jaya Abadi.